

PELAKSANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN

Ratty Puspitasari, Sujianto, dan Zaili Rusli

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Implementation, Development of Frontier Area.. The objectives of this research are to find out and analyze implementation of development in frontier area at Kabupaten Indragiri Hilir (Case Study in Kecamatan Kempas), impeller factor and resistor of development in spacially frootier area Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. This research type is kualitatif descriptive approach. Research location in Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Technique in collection of sampel use sampling purposive technic. Data analysis use descriptive method of analysis. Technique analysis data is data collection, data reduction, data display, conclution drawing and verification. The result of research is implementation of development in spacially frootier area Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir have goodness. Planning process, implementation and observation of development executed better, but not yet maximally generalization of development. As for factor impeller implementation of development in frontier area is society participation and caring of society, while its resistor factor that is limitation of budget and conflict of authority.

Keywords: Implementation, Development of Frontier Area

Abstrak: Pelaksanaan, Pembangunan Daerah Perbatasan.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembangunan daerah Perbatasan di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus di Kecamatan Kempas) dan faktor pendorong dan penghambat pembangunan daerah perbatasan khususnya di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik dalam pengumpulan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, adapun teknik analisis data dengan langkah-langkah yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan (*conclution drawing and verification*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sudah baik. Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilaksanakan dengan baik, namun belum secara maksimal terjadinya pemerataan pembangunan. Adapun faktor pendorong pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan seperti partisipasi masyarakat dan rasa kepedulian masyarakat, sedangkan faktor pengambatnya yaitu keterbatasan anggaran dan konflik kewenangan.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pembangunan Daerah Perbatasan.

PENDAHULUAN

Konsekuensi logis dari penerapan asas desentralisasi adalah menuntut pemerintah daerah untuk siap menata keseluruhan perangkat organisasi dan manajemen, serta kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan ini merupakan prasyarat bagi kemampuan pemerintah daerah untuk sukses dalam melaksanakan program-program pembangunan

yang tepat sasaran maupun tepat guna. Sebaliknya, ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada akan menyebabkan pembangunan daerah menjadi tertinggal dan tidak akan mampu memenuhi harapan, serta kebutuhan rakyat. Untuk itu, diperlukan langkah nyata yang terpadu dan terarah dalam rangka pembangunan daerah tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah dengan kon-

disi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus seimbang jangan sampai ada kesenjangan antar daerah yang disebabkan tidak meratanya perhatian pemerintah ke tiap daerah-daerah yang dimilikinya, karena hal tersebut dapat memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumber daya dan aktivitas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Agar pembangunan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi masing-masing daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan selama ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Akibatnya sudah tidak menjadi rahasia lagi bila keadaan infrastruktur di daerah perbatasan jauh dari memadai. Untuk itu, percepatan pembangunan di daerah perbatasan ini memerlukan strategi pembangunan yang sesuai dengan keadaan struktur demografis dan struktur sosial masyarakat yang ada. Dengan demikian, pembangunan tersebut akan mendapat sambutan dari masyarakat setempat. Seperti daerah perbatasan diarahkan untuk membuka, mengembangkan dan mempercepat pembangunan daerah dikawasan tersebut serta me-

nyelarasi laju pertumbuhan daerah perbatasan seperti daerah lainnya yang lebih dulu berkembang.

Sesungguhnya keberhasilan pembangunan di daerah perbatasan dalam kehidupan sosial dan politik menjadi ukuran keberhasilan pembangunan secara nasional. Sebab daerah perbatasan merupakan pintu gerbang masuk suatu wilayah. Oleh karena itu, daerah ini perlu diperbaiki dan dibina sehingga dapat menimbulkan kesan baik terhadap pembangunan di daerah yang berkenaan.

Jika kita melihat potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, dan strategi serta kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, maka beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khususnya didalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2018. Sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu diwujudkan karena memiliki makna menghimpun akumulasi dana dalam menanggulangi berbagai masalah pokok yang merupakan masalah bersama dalam konteks pembangunan nasional dan regional di daerah. Mendukung akselerasi pembangunan secara terpadu untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan.

Pengembangan infrastruktur salah satunya dilakukan pada Jalan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan, Jalan penghubung Kabupaten dan Kecamatan, Jalan Ibu Kota Kecamatan, Jalan Poros Desa, Jembatan, Dermaga, Listrik, Drainase, Infrastruktur penunjang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Penataan pembangunan Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan yang rapi, modern, indah dan bermartabat. Reformasi pelayanan birokrasi yang bersih, mudah, cepat, adil dan ramah. Pengembangan potensi wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terintegrasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus seimbang jangan sampai ada kesenjangan antar daerah yang disebabkan tidak meratanya perhatian pemerintah ke tiap daerah-daerah yang dimilikinya, karena hal tersebut dapat memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumber daya dan aktivitas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Agar pembangunan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi masing-masing daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Pelaksanaan Forum SKPD ini harus memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) secara online yang ada di Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, untuk itu agar seluruh agenda proses perencanaan mulai dari Musrenbang Kecamatan sampai menjadi KUA/PPAS mengikuti mekanisme tersebut. Penyelenggaraan Forum SKPD Kabupaten Indragiri Hilir ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai wahana persiapan materi menjelang pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam pelaksanaan Forum SKPD kali ini, mekanisme pembahasan sama dengan pelaksanaan Forum SKPD tahun lalu. Pembahasan tidak melibatkan kecamatan dan pembahasan hanya dilakukan oleh SKPD dengan koordinator bidang Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus pembahasan adalah mensinkronkan program dan kegiatan dari seluruh usulan kecamatan kedalam Ren-

cana Kerja SKPD dan menentukan program/kegiatan prioritas sesuai dengan pagu indikatif dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD 2013 – 2018.

Selama ini perhatian para aparatur pemerintahan di wilayah perbatasan dirasakan masih kurang. Kementerian, lembaga, serta daerah memang belum memiliki koordinasi yang optimal. Bahkan untuk anggaran wilayah perbatasan pun masih berjalan sendiri-sendiri. Ini membuat batas wilayah belum sepenuhnya terselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan program pembangunan daerah tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding daerah lainnya. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antarnegara, daerah pulau-pulau kecil, daerah pedalaman, serta daerah rawan bencana. Disamping itu, perlu perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi mempunyai potensi untuk maju namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terjadinya konflik sosial maupun politik.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik dalam pengumpulan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, adapun teknik analisis data dengan langkah-langkah yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

HASIL

Pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sudah baik, namun belum secara maksimal terjadinya pemerataan pembangunan. Indikator pelaksanaan pembangu-

nan daerah perbatasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Proses perencanaan pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan pada Kecamatan Kempas yaitu sudah baik dikarenakan proses rencana pembangunan dimulai dengan proses penyusunan usulan masyarakat melalui kegiatan musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga nasional. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan *bottom up* yang berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Usulan masyarakat yang disusun melalui kegiatan musrenbang tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Selain dari pada itu pemerintah juga menjalankan pembangunan yang partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Pembangunan yang partisipatif tersebut akan menciptakan ruang transparansi dan kondusif antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal sehingga terhindar dari konflik-konflik sosial.

Proses pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan pada Kecamatan Kempas sudah baik dikarenakan pemerintah sebagai implementor pembangunan telah bekerja secara maksimal untuk meningkatkan infrastruktur daerah perbatasan khususnya Kecamatan Kempas. Pemerintah telah melaksanakan proses pembangunan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat atau lokal. Aspirasi masyarakat diperoleh dari kegiatan penyusunan usulan melalui musrenbang desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan *bottom up* dengan berorientasi kepada masyarakat, integratif, adaptif dan kondusif. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik pada saat proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan maka akan menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya lokal sehingga pembangunan tersebut mampu untuk membangkitkan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya tentu ini disesuaikan dengan potensi

yang ada. Selain dari pada itu pemerintah sudah melakukan pemerataan pembangunan di daerah perbatasan, namun belum secara maksimal dan keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Ada beberapa infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang diperlukan seperti jalan, jembatan, air bersih dan listrik.

Sedangkan proses pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Kempas sudah baik, hal ini dikarenakan terdapat lembaga atau Tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengawasan pembangunan. Tim Pengawas melakukan pengawasan baik pada saat perencanaan hingga sampai pada proses pelaksanaan. Selain dari tim pengawas, pihak pemerintah juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pembangunan daerah perbatasan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak terlepas dari aturan atau pedoman yang mengatur proses pengawasan tersebut seperti UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan serta RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Faktor pendukung pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan pada Kecamatan Kempas yaitu faktor partisipasi masyarakat dan rasa kepedulian masyarakat sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pembangunan yaitu faktor pendanaan atau anggaran dan faktor konflik kewenangan.

PEMBAHASAN

Secara administratif, ekonomi dan sosial wilayah-wilayah perbatasan kurang mendapatkan perhatian secara serius oleh pihak pemerintah. Hal ini disebabkan letak daerah perbatasan secara geografis yang jauh dipedalaman atau jauh dari jangkauan pembangunan serta akses pengawasan, pengendalian pusat-pusat pemerintahan akibatnya kurangnya pembangunan. Selama ini akses pembangunan untuk daerah perbatasan dapat dikatakan masih kurang, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan pembangunan non fisik. Ada beberapa faktor pendorong dan

penghambat pembangunan daerah perbatasan pada Kecamatan Kempas sebagai berikut :

Pembangunan partisipatif yaitu proses pelaksanaan pengembangan dan peningkatan infrastruktur daerah dengan melibatkan semua *stakeholders* atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pada masyarakat Kecamatan Kempas memiliki rasa partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan. Partisipasi tersebut dalam hal mulai pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui peranan aktif masyarakat dalam menjaga kondisi dan mendukung proses pembangunan, ikut serta secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan.

Kesadaran warga masyarakat untuk ikut serta menjaga proses pelaksanaan pembangunan perbatasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Para tokoh masyarakat adat, suku, agama, pendidikan, unsur kepemudaan dan kelompok masyarakat saling memiliki rasa kepedulian dan berbaur dengan masyarakat yang turut berperan dalam proses pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan perencanaan pembangunan. Selain dari pada itu tokoh masyarakat memiliki rasa kesepakatan sikap dan tujuan bersama untuk perkembangan dan kemajuan daerah perbatasannya.

Salah satu unsur pendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sumber daya keuangan atau pendanaan. Keterbatasan sumber daya keuangan akan menyebabkan terhambatnya proses pembangunan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki keterbatasan anggaran dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan Kecamatan Kempas sehingga hanya ada beberapa usulan masyarakat yang dapat dilaksanakan. Mengantisipasi keterbatasan anggaran tersebut pemerintah daerah melaksanakan prioritas pembangunan sesuai dengan skala paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat atau lokal serta merekomendasikan untuk menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.

Pembangunan suatu daerah khususnya daerah perbatasan memerlukan adanya tujuan yang sama, keperluan yang sama dan cita-cita yang sama. Dari kesamaan tersebut maka akan memunculkan kesamaan ideologi, bahasa dan kesamaan rasa. Sebaliknya jika ketiga elemen tersebut tidak terjalin maka akan menimbulkan konflik dan permasalahan. Pada Kecamatan Kempas terjadinya konflik kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan. Terjadinya tumpang tindih siapa yang berwenang melakukan pembangunan perbatasan.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dan saran-saran untuk pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan pada Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Pembangunan daerah perbatasan hendaknya dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dengan prinsip untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat dengan mewujudkan kehidupan masyarakat daerah perbatasan yang sejahtera, berkeadilan dan keharmonisan dalam segala aspek kehidupan.
2. Pembangunan daerah perbatasan perlu dilakukan melalui pendekatan keamanan yaitu menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mewujudkan keserasian hidup dengan damai antar tokoh masyarakat, pemerintah dengan masyarakat dan antar daerah perbatasan yang ada dijalur perbatasan atau disepanjang daerah perbatasan tersebut serta menghindari konflik daerah dan konflik horizontal didalam masyarakat.
3. Pembangunan daerah perbatasan tidak hanya perlu pendekatan pembangunan fisik, namun juga perlu pembangunan non fisik yakni meningkatkan kualitas SDM baik melalui jalur pendidikan formal dan informal sehingga menjadi pelindung dan pengembangan dimasa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Syukur., 1987, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi. Ujung Pandang.
- Agus Suryono., 2010, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang.
- Arikunto Suharsimi., 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Burham Bungin., 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta.
- Gie, The Liang., 1976, *Pengertian Administrasi di Indonesia. Suatu Tinjauan Kepustakaan*. BPA-UGM, Yogyakarta.
- Gie, The Liang & Sutarto., 1977, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Karya Kencana, Yogyakarta.
- Ginanjar Kartasasmita., 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES, Jakarta.
- Lubis, Hari S.B. & Huseini, Martani., 1987, *Teori Organisasi*, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muljarto Tjokrowinoto., 1996, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurdin Usman., 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurman., 2003, *Strategi Pembangunan Daerah*, Cetakan Pertama Rajawali Pers, Jakarta.
- Pamudji., 1985, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Raja Ilyas Aman., 2009, *Buku Ajar Administrasi Pemerintahan Daerah*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Riyadi, Deddy Supriady B., 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat., 1990, *Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Sondang P. Siagian., 1974, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono., 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta.
- Sujianto & Tiyas Tinov., 2010, *Strategi Pengembangan Daerah Perbatasan*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Tjahya Supriatna., 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.